



Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
FORUM PEMRED DALAM RANGKA PENINGKATAN
SINERGITAS ANTARA PEMDA DENGAN MEDIA DI DIY
28 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Narasumber dari SKH Harian Kedaulatan Rakyat, Bapak Ahmad Lutfi;
Hadirin Tamu Undangan dan Para Peserta Forum Pemred DIY yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat tak kurang suatu apapun.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan ucapan "Selamat datang dan terimakasih" kepada Narasumber beserta seluruh jajaran Pimpinan Redaksi Media Massa baik cetak, elektronik, dan online di DIY, yang telah berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Pertemuan ini sangat penting artinya karena selain untuk meningkatkan jalinan silaturahmi, juga diharapkan akan meningkatkan hubungan kemitraan yang

sinergis dan lebih baik, antara Pemerintah Daerah DIY dengan media massa yang ada di DIY.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Eksistensi media massa saat ini memang lebih mendapatkan tempat untuk memosisikan diri sebagai pilar keempat demokrasi (*fourth estate*) dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan pembagian kekuasaan, seperti Indonesia. Bisa kita gambarkan bahwa media massa merupakan kekuasaan mandiri, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Realitas tersebut merupakan angin baru bagi kehidupan media massa di tanah air. Setidaknya, media massa pada saat ini dapat lebih memberdayakan dirinya sembari tetap mempertahankan empat fungsi pokoknya, yakni, memberikan informasi (*to inform*), menjadi media pendidikan (*to educate*), sarana hiburan bagi masyarakat (*to entertain*), dan kontrol sosial (*social control*). Keempat fungsi pokok tersebut harus dikayuh dalam bingkai-bingkai norma yang berlaku, baik norma hukum, norma agama, norma susila, maupun norma kesopanan. Dengan begitu, cita-cita pers yang bertanggung jawab tidak lagi hanya mengukir di atas laut.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita menyadari bahwa konsepsi ideal di era otonomi daerah telah memberikan kesempatan besar bagi media massa untuk lebih berperan aktif, sekaligus merupakan peluang dan tantangan untuk lebih maju. Peran media massa semakin penting dalam meningkatkan kreativitas dan semangat membangun daerah. Sekaligus diharapkan untuk menyediakan diri menjadi sarana guna mewujudkan apa yang diwujudkan sebagai *good governance*, termasuk *clean government*, akuntabilitas, dan sebagainya. Media massa harus tetap memegang kebenaran, meletakkan kepentingan publik di atas segalanya, tetap memegang

teguh asas independen, menggunakan metode yang etis untuk mengecek kebenaran, serta lebih memberikan kesempatan untuk forum wacana publik, menjaga berita yang proporsional, serta tetap jujur kepada hati nurani.

Untuk itulah, maka maksud diselenggarakannya kegiatan Forum Pimpinan Redaksi Media Massa di DIY adalah dalam rangka Peningkatan Sinergitas antara Pemda DIY dengan Media Massa di DIY. Tujuannya adalah pemda DIY serta Media Massa di DIY sebagai media arus utama dapat saling bersinergi di dalam penyampaian informasi serta pemberitaan tentang berbagai isu utama nasional (seperti pemilu, kesatuan dan persatuan bangsa dll) dan isu daerah (seperti pembangunan bandara, bencana dll) yang diharapkan dapat bermuara pada pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah DIY.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan selalu meridhoi kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2019

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
SETDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
KICK OFF MEETING
IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA 2019
Yogyakarta, 27 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Para Narasumber, yang saya hormati,
Hadirin dan Para Peserta Pertemuan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ditempat ini dalam keadaan sehat wal,afiat.

Selanjutnya kami menyambut baik pertemuan ini, sebagai upaya bersama untuk menyamakan persepsi diantara semua pihak tentang budaya pemerintahan SATRIYA guna merespon percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka telah terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan membawa implikasi beralihnya sebagian besar urusan pemerintah pusat kepada daerah. Konsekuensinya adalah ada keharusan untuk melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya aparatur penyelenggara pemerintah daerah.

Adapun tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui *pemberian pelayanan secara prima* kepada masyarakat di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, hal utama yang kita perhatikan adalah apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dari Pemerintah Daerah dan apa yang Pemerintah Daerah dapat agendakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itulah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa merefleksikan interaksi yang sinergis antara pejabat publik dan aparatur birokrasi Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya, melalui ruang partisipasi yang proporsional sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing.

Dengan demikian perlu untuk mengupayakan penyelarasan peran dan penyesuaian posisi birokrasi pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pembenahan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam mewujudkan upaya tersebut maka kita semua harus memahami dan menghayati benar-benar paradigma baru tentang penyelenggaraan pelayanan aparatur pemerintahan yang dibutuhkan pada saat ini, yaitu *“satu paradigma yang menempatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat diatas segala-galanya, atau dalam artian lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai pelayan atau abdi masyarakat*

yang baik”. Sebagai seorang aparatur pemerintahan, kita harus memiliki tekad yang kuat dan bulat, didasari oleh rasa tanggung jawab baik terhadap pemerintah maupun bagi masyarakat di daerah dan lebih luas lagi terhadap bangsa dan negara dalam mengabdikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintah daerah, maka posisi kita merupakan unsur pelaksana pembangunan dengan mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat sekaligus pemersatu bangsa, yang senantiasa dituntut dapat berperan lebih dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Hal ini sesuai dengan agenda pembangunan bangsa yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, bersih, amanah, transparan, profesional dan akuntabel, agar mampu melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.

Selain sebagai pelayan publik, seorang aparatur juga berfungsi sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat mendorong upaya mewujudkan pelayanan yang terbuka dan penuh tanggungjawab ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menuju pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang berorientasi global, dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk menyikapi perkembangan tersebut maka perlu melakukan berbagai upaya yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah Daerah. Sebagai aparatur pemerintah, kita juga dituntut untuk selalu berkreasi, dan berinisiatif. Jadikanlah potensi diri sebagai motivasi, semangat mengabdikan yang diawali dari lingkungan terkecil, yaitu pada lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat dan lingkungan pekerjaan/kantor. Sehingga selaku aparatur yang mengemban tugas dalam melayani masyarakat saudara akan dituntut untuk

senantiasa mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sebagai seorang PNS maka kita juga diharapkan selalu mematuhi dan berpedoman pada peraturan tentang larangan dan kewajiban disiplin bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, untuk dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Sekaligus mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu pengetahuan serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai, semua itu ke depan diharapkan akan dapat bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara sendiri. Tingkatkan kepekaan dalam mencermati setiap keadaan yang tengah kita hadapi pada waktu sekarang ini, serta mampu merubah setiap tantangan menjadi peluang yang terbaik.

Kembangkanlah keterampilan manajemen, baik konseptual (*conceptual skill*), interaksi antara sesama rekan (*human relation skill*), dan kemampuan teknis (*technical skill*). Karena kompleksitas dalam mengelola pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara, mau tidak mau membutuhkan kemampuan manajemen yang baik agar terbentuk sikap kemandirian dalam bekerja, mampu bekerja sama dalam *teamwork*, dan mampu mengelola tugas dan tanggung jawab secara terencana sampai berhasil.

Kita harus mampu menikmati kesungguhan dalam menciptakan karya terbaik yang terus dipelihara dan ditingkatkan mutunya. Dengan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, artinya mempunyai keunggulan dan prestasi dengan wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa kompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika kerja sehingga akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Untuk menjadi lebih unggul dan berprestatif maka kita harus mempunyai kemampuan mengoreksi sikap mental supaya bisa lebih ulet dalam menempa diri, untuk mewujudkan lingkungan atau sistem kerja yang kondusif dan mampu merangsang kita untuk berprestasi, serta selalu mempererat hubungan tali silaturahmi.

Saudara-saudara sekalian,

Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan tema pertemuan kali ini, maka perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY telah mempunyai dasar filosofi yang kuat, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu *Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah*. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan daerah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk itulah, guna mewujudkan hal tersebut maka Aparatur Pemerintah Daerah DIY diharapkan dapat membangun pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dalam bekerja dan berinteraksi

dengan memperhatikan sikap SATRIYA sebagai watak yang memiliki sikap memegang teguh ajaran moral “*sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*” (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggungjawab). Sifat-sifat inilah yang diharapkan dapat menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Adapun SATRIYA sebagai akronim terdiri atas Selaras, Akal budi luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Selanjutnya sebagai pedoman sikap dan perilaku aparatur pemerintah di lingkungan Daerah DIY, masing-masing kata dalam singkatan tersebut diberikan indikator sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan dan evaluasinya.

Hal ini akan sesuai dengan pencapaian misi “*Hamemayu Hayuning Bawono*” serta mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah DIY untuk menjadi birokrat yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik serta sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Selain itu diharapkan untuk selalu mengembangkan adanya inovasi dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan birokrasi yang tepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memanjatkan idho Tuhan Yang Maha Esa, *Kick Off Meeting* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA 2019, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PADA PELUNCURAN DAN PERESMIAN
APLIKASI SIPINTER
(SISTEM INFORMASI PENILAIAN MANDIRI
PENERAPAN SISTEM MERIT)
Jakarta, 20 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati;

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insy Allah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin dan saudara sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat lokal, Pemda DIY senantiasa membangun *behavior* agar terhindar dari penyakit birokrasi seperti kurang disiplin, gagap teknologi, asal mengisi presensi, kurang terampil, sampai cuma makan gaji buta. Sehingga dalam kaitan ini *skill* pegawai sangat kami perlukan, karena dengan *skill*

yang dimiliki akan menunjukkan kompetensi pada bidangnya, bukan semata-mata mengejar presensi yang harus diisi tiap harinya.

Dan *behavior* ini akan terbangun seiring terbangunnya budaya pemerintahan SATRIYA sebagai budaya kerja yang digunakan dalam kesehariannya, demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Membangun budaya kerja di lingkungan PNS Pemda DIY ini, tujuannya untuk menempatkan pegawai sebagai aset dari organisasi, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

Selanjutnya terkait dengan Sistem Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang berlaku secara adil, wajar tanpa diskriminasi. Di lingkungan Pemda DIY, penerapan Sistem Merit telah dimulai dengan pelaksanaan pemetaan kompetensi kepada seluruh pengawas (eselon 4) yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2017. Pemetaan pegawai sebagai bagian dari manajemen talenta yang merupakan proses menuju Sistem Merit tersebut.

Manajemen ASN dengan Sistem Merit tersebut akan membandingkan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan konsep penilaian mandiri sistem merit, yang dibangun oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi pengawas.

Untuk itu kami sangat mengapresiasi diluncurkan dan diresmikannya Aplikasi SIPINTER ini. Kendati cukup sulit untuk

diterapkan karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari segenap jajaran kepegawaian di instansi pemerintahan akan konsep serta penerapannya, tetapi kami Pemda DIY harus bisa melaksanakan sistem merit di dalam manajemen aparatur.

Dengan melaksanakan sistem merit ini, perekrutan sumber daya manusia dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, hingga sistem informasi, yang kami laksanakan bisa menjawab tantangan pada era mendatang, yaitu upaya reformasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta melayani. Sehingga ASN yang berkualitas dalam arti kompeten, netral, berintegritas dan kinerja tinggi dapat segera terwujud.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat atas diluncurkan dan diresmikannya APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT (SIPINTER). Semoga *Allah SWT* selalu melimpahkan kepada kita karunia yang agung, kasih sayang yang terus menerus, melindungi kita dari setiap kekuatan jahat dan menjadikan kerja kita kerja yang berkualitas, dalam arti kompeten, netral, berintegritas dan kinerja tinggi.

Karakter ASN DIY yang berkembang menjadi aparatur yang mampu menerapkan asas umum pemerintahan negara yang baik, menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum, serta mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PAGELARAN WAYANG KULIT
FORUM LINTAS KOMUNITAS MALIOBORO
Yogyakarta, 12 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yang saya hormati, Ketua Forum Lintas Komunitas Malioboro;
- Yang saya hormati, Ki Dalang Seno Nugroho;
- Segenap Keluarga Besar Lintas Komunitas Malioboro;
- Tamu Undangan dan Seluruh Warga Masyarakat Yogyakarta yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik pagelaran Wayang Kulit dengan tema "Terciptanya Pemilu 2019 yang aman, damai, anti hoax dan tidak goput". Pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin nasional melalui sistem pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan Pemilu tidak hanya sekadar memilih pemimpin saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun

sebuah peradaban bangsa yang religius, maju, demokratis, berdaulat, adil dan sejahtera.

Untuk itu kepada semua pihak untuk dapat mengedepankan etika politik yang berkeadaban, santun dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah dan merusak kerukunan bangsa. Perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan penuh kedewasaan, saling menghormati dan saling memuliakan. Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar persaudaraan sebagai bangsa tetap terpelihara.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian,

Pagelaran wayang kulit kali ini sekiranya mempunyai nilai yang sangat penting bagi kita semua, karena disamping dapat memberikan ruang kepada seniman untuk berkreasi, juga dapat memperkenalkan dan menanamkan kecintaan akan khasanah budaya Indonesia kepada generasi muda kita. Tidak sekedar menghadirkan tontonan saja, namun juga tuntunan, melalui cerita yang penuh filosofi dan ajaran luhur yang tercermin dari watak dan karakter tokoh-tokoh wayang yang mencerminkan kepribadian kita. Karena Wayang mempunyai pengertian "*wewayanging ngaurip*" yang artinya gambaran kehidupan kita bersama.

Potensi kesenian wayang ini merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk dikembangkan, karena tidak saja untuk membendung arus besar budaya populer yang cenderung mengesampingkan norma dan nilai kemanusiaan, akan tetapi seni pertunjukan wayang ini diharapkan dapat meminimalisasi pandangan yang sempit tentang nilai kehidupan serta kemanusiaan.

Di samping itu, wayang sekaligus dapat di pakai sebagai sarana kegiatan kita dalam memajukan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan dan demokrasi serta nilai-nilai kebangsaan. Sehingga harus dipertahankan keberadaannya. Artinya, tanggung jawab untuk mempertahankan khasanah seni budaya yang sudah ada sejak dulu adalah dengan sebanyak mungkin menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni budaya di tengah masyarakat, sehingga seni budaya akan terus hidup. Seni budaya ini, memang merupakan warisan leluhur yang diturunkan bagi generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan dijaga perkembangannya.

Dalang harus mempunyai prinsip berpijak di atas semua kelompok dan golongan. Sebagai kesenian adiluhung, pedalangan juga tidak harus dipersepsikan dengan menengok masa lalu. Tetapi justru bagaimana kita memandang adiluhung itu sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itulah, saya ucapkan terimakasih kepada Forum Lintas Komunitas Malioboro serta Ki Dalang Seno Nugroho beserta seniman lainnya yang telah bersedia untuk menghibur masyarakat Yogyakarta, merupakan kreasi seni dengan memadukan konsep yang memuat unsur seni serta pesan moral dengan melibatkan seniman lokal.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita sekalian. Sehingga pertunjukan Wayang Kulit kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
TAHUN 2019
GOR Amongrogo, 15 Maret 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Ketua Umum KONI DIY, yang saya hormati;
- Para Official, Pembina, Pelatih serta Para Atlet Pelajar dari Kabupaten/Kota se-DIY, yang saya banggakan;
- Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY Tahun 2019. Dengan harapan kegiatan ini dapat mencetak calon bibit-bibit baru atlet tingkat pelajar, yang ke depan akan mampu berkiprah secara nasional maupun internasional. Ajang ini sekaligus dapat memberikan motivasi bagi pelajar untuk lebih mencintai olahraga. Serta sebagai ajang mempererat jalinan tali

silaturahmi antar pelajar serta dan memberikan hiburan tontonan menarik secara langsung bagi masyarakat Yogyakarta.

Para Atlet dan Saudara-saudara sekalian,

Kita bersama-sama menyadari bahwa keberhasilan pembinaan atlet dapat dipantau dari prestasi yang dicapai pada suatu kejuaraan, betapapun bagus program latihan yang diterapkan, jika dalam kejuaraan tidak dapat mencatat prestasi, maka pembinaan belum dapat dikatakan berhasil. Untuk mewujudkan kenyataan tersebut maka kejuaraan pada POPDA ini, sekiranya merupakan tempat untuk membuktikan tingkat prestasi yang akan diraih oleh para atlet pelajar di DIY serta tingkat keberhasilan para pelatih di dalam melakukan pembinaan.

Saat ini kompetisi olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional semakin ketat dan keras. Hanya dengan keuletan dan kerja keraslah prestasi gemilang olahraga dapat kita wujudkan. Seperti pada ajang POPDA dan even lainnya dapat menjadi ajang puncak prestasi bagi para atlet kita, karena ajang tersebut merupakan barometer untuk mengukur keberhasilan daerah dalam pembinaan olahraga, terlebih pada ajang yang dipertandingkan secara nasional, regional maupun internasional.

Dalam bidang olahraga pelajar, pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat di bidang olahraga dari pelajar. Selanjutnya, dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat provinsi seperti ini. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Sehingga pembinaan olahraga sekarang ini tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Hadirin sekalian serta Para Atlet,

Torehkan prestasi terbaik di arena POPDA kali ini, jaga nama baik Kabupaten/Kota yang saudara wakili, jaga kesehatan, jaga kekompakan, maka para atlet pelajar sekalian akan dapat mempersembahkan yang terbaik. Selain itu, sesuai dengan jiwa yang terkandung didalam olahraga yaitu sportivitas, maka para atlet pelajar, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Memang harus berusaha secara maksimal untuk meraih prestasi terbaik, tetapi jangan sampai prestasi tersebut tercoreng dengan perbuatan yang menyimpang dari unsur sportivitas, dengan menjunjung permainan yang bersih dan cantik pasti akan diperoleh hasil yang sempurna.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim*, Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY Tahun 2019, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan selalu meridhoi segala upaya dan kerjakeras kita semua.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

GOR Amongrogo, 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN DIKLAT
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IV BADAN
DIKLAT DIY TAHUN 2019
Yogyakarta, 21 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tamu Undangan, Para Pengelola, Widyaiswara, serta Para Instruktur Bandiklat DIY yang saya hormati;
Para Peserta Diklat Pim IV Angkatan IV yang saya banggakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini guna mengikuti Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV Tahun 2019 Bandiklat DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan ucapan "Selamat datang" kepada para peserta Diklat terlebih kepada saudara-saudara sekalian yang berasal dari luar DIY. Semoga suasana Bandiklat DIY yang jauh dari keramaian, akan dapat memberikan kenyamanan bagi para peserta didalam mengikuti Diklat, sehingga akan memudahkan

dalam menerima semua materi pendidikan dan pelatihan dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara sekalian,

Kita memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi pemerintahan. Karena dengan apapun bentuk dan tujuannya, sebuah organisasi pemerintahan akan dilaksanakan berdasarkan visinya dan digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan misinya akan dikelola dan diurus oleh SDM, yang merupakan faktor sentral dan strategis dalam semua kegiatan organisasi pemerintahan.

Hal ini penting, mengingat adanya perubahan dan perkembangan keadaan yang begitu cepat di semua lini kehidupan masyarakat, sehingga menuntut adanya daya kreatifitas dan semangat juang yang tinggi dari segenap unsur aparatur pemerintah khususnya para peserta diklat sekalian untuk bersatu padu, bahu membahu dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang sedang dan akan terjadi pada saat sekarang ini.

Sebagai unsur pimpinan aparatur negara, maka kita harus memahami dan menghayati benar-benar paradigma baru pelayanan aparatur pemerintahan, yaitu satu paradigma yang menempatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat diatas segala-galanya, atau dalam arti lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai pelayan atau abdi masyarakat yang baik.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan pada saat ini akan mempunyai arti sangat strategis, karena dengan pendidikan saudara sekalian akan lebih siap guna memikul tanggung jawab yang lebih berat dengan peningkatan kemampuan intelektual ataupun emosional yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan dan pengabdian agar lebih baik. Dengan pelatihan maka akan meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan dan sikap/perilaku yang lebih baik. Sehingga akan meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi saudara sekalian, terutama dalam menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan.

Untuk itulah, saya menaruh harapan yang besar kepada para peserta Diklatpim IV Angkatan IV tahun 2019 ini, nantinya mampu menjadi pemimpin yang visioner, kreatif, berkualitas, serta mampu menjadi pionir bagi kemaslahatan masyarakat. Mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai dari pelaksanaan Diklat, semuanya kita harapkan ke depan akan bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara sendiri di instansinya masing-masing.

Selain itu, sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepantasnyalah kita membuktikan diri sebagai dinamisator, motivator dan fasilitator pembangunan. Tentunya hal ini harus dibarengi pula dengan dedikasi tinggi dan totalitas kerja dari kita semua melalui peningkatan kinerja. Tingkatkan kepekaan dalam mencermati setiap keadaan yang tengah kita hadapi pada waktu sekarang ini, serta mampu merubah setiap tantangan untuk dapat menjadi peluang yang lebih baik.

Kembangkanlah keterampilan manajemen, baik konseptual (*conceptual skill*), interaksi antara sesama rekan (*human relation skill*), dan kemampuan teknis (*technical skill*). Karena kompleksitas dalam mengelola pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara, mau tidak mau membutuhkan kemampuan manajemen yang baik agar terbentuk sikap kemandirian dalam bekerja, mampu bekerjasama dalam

teamwork, dan mampu mengelola tugas dan tanggung jawab secara terencana dan berhasil.

Para Peserta Diklat sekalian,

Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak kita.

Tidak lupa juga, pada kesempatan ini atas nama Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diluar DIY yang telah percaya dan berkenan untuk mengirimkan peserta pada Diklatpim kali ini. Dan pada prinsipnya kami akan terus berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Diklat dari tahun ke tahun dengan lebih baik lagi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim*, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
RAPAT KERJA NASIONAL
*INTERNATIONAL COUNCIL FOR
SMALL BUSINESS 2019*
Sleman, 30 Maret 2019

*Bismillahirrahmirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Budhaya*

Yang Kami Hormati,

- Jajaran Ketua dan Pengurus *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Perwakilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang kami hormati pula.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional *International Council For Small Business 2019* dalam keadaan sehat wal'afiat. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dapat hadir dan berjumpa dengan hadirin sekalian.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Indonesia sejatinya adalah negara dengan kekayaan sumberdaya yang luar biasa, baik dari segi alam dan manusianya. Bentang alam yang sangat kaya dari Sabang hingga Merauke, seakan memanjakan penduduk Indonesia untuk menikmati dan memanfaatkannya dengan seksama.

Namun, jumlah penduduk yang sangat padat dan bahkan menempati peringkat keempat di dunia dengan total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, membuat akses terhadap sumberdaya yang ada sulit untuk dimanfaatkan secara adil dan merata.

Salah satu jalan agar akses terhadap sumberdaya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia, termasuk mereka para masyarakat prasejahtera di seluruh penjuru Indonesia adalah dengan cara mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. UMKM telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto sebesar 58.92% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97.30%.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Potensi UMKM saat ini sangat baik dan terus berkembang, sehingga keberadaan UMKM ini telah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia sendiri, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Selain bank, banyak dari pihak swasta yang ikut serta untuk membantu peningkatan UMKM di Indonesia.

Maka sudah sewajarnya bila kebijakan ekonomi Pemerintah pun harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga terwujud ekonomi inklusif bagi segenap rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi inklusif ini hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan sumberdaya kepada seluruh masyarakat.

UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan UKM harus dihilangkan.

Hadirin sekalian,

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan selamat melakukan Rapat Kerja Nasional. Mari kita jadikan Rapat Kerja Nasional ini sebagai ajang bagi UMKM dan para pihak untuk saling bertemu membangun energi kolaborasi dalam memajukan UMKM di Indonesia.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Kerja Nasional *International Council For Small Business 2019*, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 29 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
SEMINAR ISU-ISU STRATEGIS
(DAMPAK BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Yogyakarta, 26 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Asisten Deputi Penelitain dan Pengkajian KUMKM;
- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Para Peserta Seminar, Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa mengucap puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti rangkaian pembukaan Seminar Isu-isu Strategis (Dampak Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Pengembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hadirin yang saya hormati,

Kebutuhan hidup manusia dalam perekonomiannya semakin hari semakin kompleks. Hal ini tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong manusia untuk bisa memiliki barang dan jasa yang semakin variatif.

Dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Indonesia tingkat pendapatan secara merata belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bahkan kesenjangan baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah justru meningkat.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, sangat diperlukan upaya peningkatan ekonomi yang juga dapat mengurangi pengangguran. Sedang keterkaitannya dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian ekonomi masyarakat, ternyata memang harus ditangani secara *holistic* dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Disinilah aspek pemberdayaan ekonomi mereka tersebut menjadi sebuah *pasing point* untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya dapat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam arti kemampuan individu bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Respon terhadap perlambatan ekonomi dan depresiasi rupiah, kemudian Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi, dalam rangka Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif; Menggerakkan Ekonomi Nasional; dan

Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Menggerakkan Ekonomi Pedesaan, serta Jaminan Sosial. Harapannya situasi dapat lebih membaik setelah beberapa langkah dilakukan untuk membenahi dan membangkitkan kembali perekonomian. Mampu menurunkan inflasi, mendorong investasi baru, dan juga mampu untuk membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat industri dengan potensi lokal.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Menyadari bahwa setiap aktifitas pembangunan yang dilaksanakan akan menimbulkan dampak, baik pada manusia ataupun lingkungan hidup, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, maka identifikasi dampak pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan langkah yang sangat penting.

Dampak terhadap manusia, yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan, yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia. Artinya, aktifitas pembangunan bandara baru tersebut merupakan salah satu proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Sehingga diharapkan ada suatu perubahan pada peningkatan mutu kehidupan, maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di DIY, dipastikan juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian, perkembangan wisata, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi DIY bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Jumlah kunjungan wisata juga potensial dapat di

tingkatkan. Tetapi semuanya itu tergantung pada sarana dan prasarana pendukung, yaitu infrastuktur bandara baru. Sebab pembangunan bandara baru di Kulonprogo bukan hanya merupakan entitas infrastruktur transportasi, tempat pendaratan dan pemberangkatan pesawat, tetapi juga terkait erat dengan aktifitas ekonomi baik itu dalam kawasan bandara, sepanjang koridor yang menghubungkan kota layanan dengan bandara, maupun kawasan luar bandara, yang disebut dengan pendekatan pembentukan kawasan pengembangan bandara dengan nama *airport city*, *airport coridor* dan *airport polis*.

Dalam hunungan itu, maka tidak mengherankan jika disekitar Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, seperti Bantul dan Kulonprogo sendiri, akan mengalami perubahan kawasan dengan banyaknya pembangunan industri properti dan jasa pendukung pariwisata yang sudah mulai masuk. Tetapi perlu diingat, jangan sampai Bandara Internasional Yogyakarta nantinya hanya menguntungkan pihak investor industri properti dan jasa pariwisata, para petani dan masyarakat terdusur juga harus diperhatikan. Mereka memerlukan berbagai pelatihan, agar bisa menikmati kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang sangat luas ini, mengingat kemungkinan untuk beralih profesi.

Daya tarik megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta sebagai amanat dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), satu paket sebagai infrastruktur pengembangan kawasan DIY yang didorong sebagai basis Industri Pariwisata, tentu menjadi salah satu magnet bagi semua orang. Hal itu mengharuskan kita untuk belajar membaca survei BPS DIY tahun 2015, yang menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi DIY masih tergolong tinggi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, dan pemilik modal besarlah yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi ini.

Oleh karena itu, keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai awal lahirnya Kulonprogo baru nantinya, mudah-mudahan Kota Wates akan menjadi kota barunya Yogyakarta, seluruh lapisan masyarakat agar mempersiapkan diri di segala aspek. Masyarakat harus bisa menangkap peluang bisnis dan ekonomi pasca pembangunannya. Masyarakat harus bisa menyambutnya dengan mengisi slot-slot yang terbuka sangat luas. Persiapan itu termasuk peningkatan peran UMKM di pasar internasional, sebab DIY merupakan daerah yang berpotensi menjadi percontohan kota pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat didayagunakan dan diolah secara maksimal, untuk menciptakan karya baru agar bisa mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, maka jangan sampai terjadi Bandara Internasional Yogyakarta tersebut hanya lebih banyak melayani pergerakan orang, terutama dengan tujuan perdagangan dan jasa, akibat dukungan kuatnya citra Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan pendidikan.

Pemkab Kulonprogo harus segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, harus menyiapkan sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan. Artinya, masyarakat Kulonprogo harus bisa menjadi pelaku utama, jangan sampai hanya menjadi penonton. Jadikanlah Bandara Internasional Yogyakarta itu menjadi pintu gerbang utama bagi DIY yang akan mendorong industri dan pariwisata, yang mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan, serta persaingan global yang cepat,

sekaligus mengembangkan *Brand Image* Jogja Istimewa, untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan potensi, aspirasi, dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dengan *brand* Jogja Istimewa kita dapat menonjolkan ciri khas Yogyakarta dengan karakter keistimewaannya, yang memuat sembilan arah *renaissance* atau pencerahan, yakni pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang, dan lingkungan. Sehingga ke depan dapat memajukan ekonomi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbaik. Hal ini dapat terwujud dengan kerja semua pihak dan kesadaran bersama demi perubahan untuk maju.

Oleh karena itu, saya menyambut baik kegiatan Seminar Isu-isu Strategis (Dampak Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Pengembangan UMKM di DIY), menyambut kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta dalam hal pengembangan UMKM menghadapi gelombang industri digital saat ini.

Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati,

Bandara Internasional Yogyakarta menjadi sebuah era baru di DIY. Arus penumpang internasional akan semakin bertambah seiring beroperasinya bandara tersebut nantinya. Oleh karena itu Yogyakarta harus menyambut bandara tersebut dengan berbagai kebijakan. Pemda DIY telah menyiapkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM sebagai bentuk sinergi masyarakat, pemerintah DIY dan perbankan. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi.

Melalui konsep KEK UMKM tersebut, diharapkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY bisa naik kelas dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan produknya sehingga bisa berdaya saing tinggi, untuk mendukung sektor pariwisata melalui hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta. Hal itu mengingat UMKM DIY diperkirakan akan mendapatkan peluang emas dengan dorongan pariwisata, baik domestik maupun mancanegara, yang akan tumbuh seiring dengan pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta nanti.

Tidak hanya itu, inovasi dalam hal industri, pariwisata dan perdagangan juga harus dilakukan, sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Harapannya, saat Bandara Internasional Yogyakarta dibuka UMKM bisa berperan aktif di dalamnya dengan konsep tematik dan dinamis.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, pada hari ini, Selasa Kliwon, tanggal 26 Maret 2019, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, pelaksanaan kegiatan Seminar Isu-isu Strategis (Dampak Bandara Internasional Yogyakarta terhadap Pengembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta), secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat dan sukses seminar yang dilaksanakan ini, semoga berjalan lancar dan bisa meningkatkan pengetahuan maupun pengertian para peserta.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Kepala Biro Umum Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN WORKSHOP PEMBERITAAN TENTANG
APBD “PERENCANAAN, PENCERMATAN,
PENGENDALIAN, LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG BAIK DAN
AKUNTABEL”
Yogyakarta Grage Jogja, 13 Maret 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Para Narasumber yang saya hormati,
Hadirin dan Para Peserta Workshop sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat hadir dalam acara Workshop pemberitaan APBD, yang diselenggarakan di Hotel Grage Jogja, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang saat ini, aparatur negara diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dengan berorientasi pada

kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sekaligus dapat meningkatkan daya saing. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan prima secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagai tujuan dan pendayagunaan aparatur negara untuk mencapai cita-cita masyarakat sejahtera.

Pada era saat ini, Hubungan Masyarakat (Humas) dalam upaya membangun citra pemerintah di mata masyarakat adalah merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pemerintahan yang dapat menjembatani arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain atau sebaliknya. Dengan perwujudan nyatanya antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik, menyampaikan informasi yang benar, merencanakan *image building* yang baik. Dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat, efektif, dan positif serta transparan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh para pemangku kepentingan lain dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kelembagaan Hubungan Masyarakat (Humas) yang kuat dan kompeten di DIY, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi secara optimal dan bertanggung jawab kepada, dari dan untuk masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, maka saya menyambut baik Workshop Pemberitaan tentang APBD dengan tema "*Perencanaan, Pencermatan, Pengendalian, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Baik dan Akuntabel*" oleh bagian Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Bagian Humas, Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Workshop tentang Pemberitaan APBD dengan tema “Perencanaan, Pencermatan, Pengendalian, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Baik dan Akuntabel” ini selenggarakan. Dengan tujuan para peserta akan mengerti dan memahami perencanaan, pencermatan, pengendalian serta laporan APBD dengan baik dan akuntabel sekaligus akan mengimplementasikannya di OPD/instansinya masing-masing secara jelas, lengkap dan terperinci

Kegiatan ini sangat penting untuk kita selenggarakan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan tahun anggaran APBD yang meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah karena dengan anggaran dapat mengetahui perkembangan pembangunan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan anggaran maka dapat diketahui skala prioritas, anggaran juga merupakan arah dan petunjuk pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam satu tahun. Dengan APBD maka pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah dalam satu tahun. APBD juga sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya kepada para peserta Workshop, diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan lebih aktif serta dapat mengerti dan mendalami materi yang akan disampaikan oleh para narasumber hingga akhir acara. Dan kepada para

Narasumber saya sampaikan ucapan terimakasih atas kesediaanya untuk menyampaikan materi pada acara ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Workshop Pemberitaan Tentang APBD dengan tema “Perencanaan, Pencermatan, Pengendalian, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Baik Dan Akuntabel”, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta Grage Jogja, 13 Maret 2019

KEPALA BIRO
UMUM HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.



Kepala Biro Umum Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN WORKSHOP
PEMBERITAAN TENTANG RPJMD “PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN RPJMD SECARA TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL”
Yogyakarta Grage Jogja, 26 Maret 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Para Narasumber yang saya hormati,
Hadirin dan Para Peserta Workshop sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat hadir dalam acara Workshop pemberitaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diselenggarakan di Hotel Grage Jogja, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang saat ini, aparatur negara diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dengan berorientasi pada

kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sekaligus dapat meningkatkan daya saing. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan prima secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagai tujuan dan pendayagunaan aparatur negara untuk mencapai cita-cita masyarakat sejahtera.

Pada era saat ini, Hubungan Masyarakat (Humas) dalam upaya membangun citra pemerintah di mata masyarakat adalah merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pemerintahan yang dapat menjembatani arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain atau sebaliknya. Dengan perwujudan nyatanya antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik, menyampaikan informasi yang benar, merencanakan *image building* yang baik. Dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat, efektif, dan positif serta transparan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh para pemangku kepentingan lain dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kelembagaan Hubungan Masyarakat (Humas) yang kuat dan kompeten di DIY, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi secara optimal dan bertanggung jawab kepada, dari dan untuk masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, maka saya menyambut baik Workshop Pemberitaan tentang RPJMD dengan tema "*Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Secara Transparan dan Akuntabel*" oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY kali ini.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Workshop Pemberitaan RPJMD dengan tema "*Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Secara Transparan dan Akuntabel*" ini

selenggarakan, dengan tujuan para peserta akan mengerti dan memahami perencanaan dan pelaksanaan RPJMD secara transparan dan akuntabel di DIY. OPD/instansi di Pemda DIY diharapkan akan mengimplementasikannya secara jelas, lengkap dan terperinci. Dan bagi institusi atau stakeholders terkait lainnya juga akan lebih mengenal dan mengetahui visi, misi dan program Kepala Daerah serta rencana pembangunan daerah DIY untuk waktu lima tahunan yang akan ditentukan dalam dokumen RPJMD.

Kegiatan ini sekiranya sangat penting untuk kita selenggarakan mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang “ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ”*).

RPJMD erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Penyusunan RPJMD harus melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik terutama dengan DPRD. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan, dan proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya kepada para peserta Workshop, diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan lebih aktif serta dapat mengerti dan mendalami materi yang akan disampaikan oleh para narasumber hingga akhir acara. Dan kepada para Narasumber saya sampaikan ucapan terimakasih atas kesediaanya untuk menyampaikan materi pada acara ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Workshop Pemberitaan Tentang RPJMD dengan tema“Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Secara Transparan dan Akuntabel”, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta Grage Jogja, 26 Maret 2019

KEPALA BIRO
UMUM HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
Yogyakarta, 4 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Walikota Bukittinggi; beserta seluruh rombongan,
- Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan “*selamat datang dan terimakasih*” atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan materi kunjungan kali ini, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dapat saya sampaikan bahwa SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh SOPD, untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang.

Semua ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan, yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Negara kita. Karena dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*. Untuk itulah diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal guna mewujudkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

Sedangkan penilaian kinerja instansi dihitung berdasarkan bobot instansi dan kinerja instansi. Penentuan bobot instansi dengan mempertimbangkan: unsur-unsur klasifikasi jabatan,

kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab. Sedangkan kinerja instansi dinilai berdasarkan kriteria antara lain: 1). Perencanaan, pengendalian program/kegiatan; 2). Pengawasan; 3). Pengelolaan Anggaran; 4). Pengelolaan sumber daya manusia; 5) Pengelolaan barang; 6) Pengelolaan arsip.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk itulah, maka dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DIY telah berhasil memperoleh nilai A dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada diskusi ini. Selanjutnya untuk pembahasan materi kunjungan lebih jauh secara teknis, terperinci dan mendalam maka dapat dibahas pada diskusi selanjutnya dengan instansi/SOPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENERIMAAN STUDY BENCHMARK
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
Yogyakarta, 21 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang yang kami hormati, Pimpinan Rombongan Study Benchmark Pemerintah Provinsi Maluku Utara; Bapak/Ibu, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadiran *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Pertama-tama, kami mengucapkan *selamat datang* kepada Bapak/Ibu sekalian di Yogyakarta, kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian atas kepercayaan memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi kunjungan study benchmark, karena memang DIY beserta Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ditunjuk sebagai pilot projek Transaksi Non Tunai.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Melalui kunjungan study benchmark ke Pemda DIY ini, diharapkan Bapak/Ibu dapat saling berdiskusi, berbagi pengalaman dan menambah wawasan. Semoga kunjungan study benchmark ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu seoptimal mungkin.

Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Bapak/Ibu rombongan study benchmark dari Provinsi Maluku Utara ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) mendapat masukan dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya. Untuk itulah saat ini telah hadir bersama kita unsur pimpinan beserta jajaran dari DPPKA DIY yang akan menjelaskan lebih lanjut.

Kami yakin ada banyak hal menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semua. Dan semoga semua hal yang menjadi pertanyaan Bapak/Ibu di sesi tanya-jawab nanti, dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan memuaskan. Selamat berdiskusi dan kami berharap kita masih dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang lain.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2019

SEKRETAIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KERJA DAERAH
PERSIAPAN PENYUSUNAN PEMETAAN KEGIATAN
KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

Yogyakarta, 13 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Kerja Daerah Persiapan Penyusunan Pemetaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Rapat Kerja Daerah Persiapan Penyusunan Pemetaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota budaya. Dengan konsekuensi tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi, misi, program, dan kegiatan yang terus terkait dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan keistimewaan DIY salah satunya adalah tentang kebudayaan, kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa, Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan bahwa Yogyakarta-Kesultanan-Pakualaman memiliki budaya yang khas, merupakan pilar dari kebudayaan Jawa pada umumnya.

Dalam konteks ini, kebudayaan dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni dan tradisi luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens dan panjang. Budaya Yogyakarta, dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan strategis dan penting khususnya dalam proses pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas bangsa, dimana saat ini bangsa Indonesia sudah eksis sebagaimana bangsa dan negara yang berdaulat.

Keistimewaan bidang kebudayaan ini, menjadi fokus dan otoritas Pemerintah Daerah DIY, oleh karena itu dalam pelaksanaannya secara otomatis akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Pemerintah Desa. Maka, kebijakan bidang kebudayaan, yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Daerah DIY harus menjadikan kebudayaan sebagai roh dari seluruh dinamika, napas, aktifitas dan gerak

pemerintahan, pembangunan serta kehidupan, kreatifitas kemasyarakatan pada umumnya.

Hadirin sekalian,

Berpijak pada esensi Undang-Undang Keistimewaan DIY, bahwa budaya sebagai roh atau spirit bagi seluruh dinamika kehidupan di DIY, dalam konteks keistimewaan DIY, maka perlu adanya langkah-langkah taktis-strategis untuk penguatan nilai budaya ke dalam praktek aktivitas hidup keseharian masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun didalam dinamika sosial kemasyarakatan umumnya.

Usaha untuk penguatan tatanan kehidupan dengan berbasis pada budaya sebagai roh, diharapkan kedepan hal tersebut menjadi pendongkrak bagi muncul kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memantapkan DIY sebagai pusat kebudayaan yang tergambar dalam gerak kehidupan masyarakat di DIY khususnya. Dengan kata lain, budaya khas Yogya menjadi ikon DIY kedepan.

Untuk mencapai semua itu perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan serta percepatan implementasi dan sosialisasi UU Nomor 13 tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, mengingat arti penting nilai-nilai budaya, sebagai basis Undang-Undang Keistimewaan;
- 2) Penggalian nilai-nilai orsinalitas budaya, sebagai basis budaya DIY;
- 3) Penguatan nilai-nilai budaya utama, sebagai rujukan bagi pengembangan nilai-nilai budaya terbaru, sesuai hakekat tumbuh-kembangnya budaya yang berakar pada budaya DIY;
- 4) Peningkatan fasilitasi, untuk perekayasaan budaya asli dalam menghadapi pengaruh budaya luar, yang masuk kedalam tatanan budaya *adihulung* Yogyakarta;

- 5) Peningkatan fasilitasi pengembangandan riset budaya dalam aspek pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artefak budaya *adiluhung*;
- 6) Memperkuat dukungan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan budaya.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Melalui Rapat Kerja Daerah Persiapan Penyusunan Pemetaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020 ini, Saya berharap adanya penguatan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemantapan implementasi keistimewaan DIY dalam urusan kebudayaan serta dapat merespon dinamika isu-isu aktual dan strategis urusan kebudayaan dalam kerangka keistimewaan DIY.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KERJA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH
“PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN”
Yogyakarta, 19 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahun keenam, tindak lanjut regulasi berupa Perdas terhadap kelima urusan keistimewaan telah diselesaikan. Kelembagaan sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan sesuai

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY maka kelembagaan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Keselarasan menjadi kunci utama agar penyelenggaraan urusan keistimewaan semakin baik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di DIY.

Sesuai amanat Perdais Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 3, untuk melaksanakan urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY telah memberikan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melalui Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

Saat ini Rapergub tentang Pedoman Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagai pedoman dalam penataan kelembagaan sedang dalam proses pembahasan. Dengan adanya penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, kedepan banyak tugas yang harus diselesaikan.

Melalui Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah ini, Saya berharap dapat terbentuk pemahaman yang sama, koordinasi yang lebih intens dan hubungan kerja yang harmonis agar pelaksanaan urusan keistimewaan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat DIY.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya seraya mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BANTUL
DAN KABUPATEN KULONPROGO

Yogyakarta, 27 Februari 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Koordinasi Teknis Kawasan Ekonomi Khusus Di Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Kulonprogo;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Rapat Koordinasi Teknis Kawasan Ekonomi Khusus Di Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Kulonprogo dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Adanya perkembangan ekonomi global, mengharuskan Indonesia perlu memfokuskan pada peningkatan ekspor dan

investasi pada beberapa kawasan khusus yang memang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Indonesia sendiri mengadopsi penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menjawab tantangan ekonomi global.

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Data-data empiris menunjukkan bahwa adanya KEK ternyata mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban didalam kawasan.

Pemberlakuan status KEK bagi daerah tertentu sangat memberikan keuntungan ekonomi secara nasional maupun regional. Tetapi, status ini juga berpotensi merugikan, karena adanya pengurangan pendapatan pajak akibat adanya insentif fiskal, dan dapat mengancam kawasan industri yang telah ada untuk pindah ke KEK yang berdampak pengurangan terhadap penerimaan negara.

Namun demikian tidak semua KEK berhasil diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan KEK di beberapa negara. Hal yang paling utama adalah lokasi KEK yang ditujuk berada didaerah terpencil (*Remote Area*), sehingga membutuhkan biaya yang

tinggi, disamping fasilitas infrastruktur tak memadai, dan belum terdapat mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangannya.

Menengok kegagalan ini, maka KEK yang akan dikembangkan di Indonesia harus berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional, memiliki infrastruktur yang memadai, serta perlunya menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta dalam pengembangan KEK tersebut.

Hadirin sekalian,

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah memiliki modal untuk melaksanakan rencana penerapan KEK di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Adanya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel, Kabupaten Gunungkidul dan Tembus Wonogiri akan sangat strategis untuk mewujudkan program ini.

Jalur ini merupakan kawasan strategis pengembangan perekonomian DIY seperti *New Yogyakarta International Airport* di Temon, Pelabuhan Tanjung Adikarto di Glagah, industri Pasir Besi di Karangwuni, serta Kawasan Wisata pantai dan perbukitan di Bantul. Disamping itu dengan dibukanya Pelabuhan Tanjung Adikarto selain sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan bagi nelayan di Pantai Selatan DIY, juga akan berubah dan berkembang menjadi Pelabuhan kapal-kapal besar yang akan melintasi Pantai Selatan DIY tersebut.

Untuk itulah dengan Rapat Koordinasi Teknis secara langsung ini dapat menjadi momentum yang baik untuk berbagi pengetahuan dan informasi dalam mengkaji rencana penerapan

Kawasan Ekonomi Khusus Di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya seraya mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Koordinasi Teknis Kawasan Ekonomi Khusus Di Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Kulonprogo, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
SEKOLAH LAPANG NELAYAN (SLN)
TAHUN 2019 DIY
Yogyakarta, 18 Maret 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Ibu Dwikorita Karnawati;
- Yang saya hormati, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati;
- Yang saya hormati, Para Narsumber;
- Hadirin Tamu Undangan serta Para Nelayan dan Penyuluh Perikanan dan Kelautan yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan apresiasi serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Unit Pelaksana Teknis Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati yang pada kesempatan ini menyelenggarakan Sekolah Lapang Nelayan Tahun 2019. Semoga

kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang informasi cuaca/iklim bagi nelayan serta penyuluh perikanan dan kelautan di wilayah DIY, sehingga mereka dapat melakukan aktifitasnya dengan aman, tepat waktu serta tepat wilayah tangkap.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu potensi usaha perekonomian rakyat yang dapat kita galakkan adalah pada sektor perikanan, yang bertujuan pada sumberdaya perikanan tangkap, maka perhatian kita tertuju pada upaya menggali untuk memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari perairan untuk menghasilkan pangan. Program pembangunan perikanan diarahkan untuk mewujudkan perikanan tangkap sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi andalan masyarakat yang dilaksanakan melalui sistem tangkap yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Melalui gerakan sektor perikanan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat terutama di pesisir dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Pembangunan sektor perikanan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu berwawasan lingkungan, berbasis komunitas, berpusat pada masyarakat, berkelanjutan dan berbasis kelembagaan serta dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dengan strategi yang berorientasi pada sumber daya yang meliputi pengelolaan sumber daya lokal, melaksanakan pembangunan perikanan yang bertanggungjawab, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini diharapkan dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan dan posisi tawar penangkapan ikan terutama pada masyarakat di pesisir serta mengembangkan pemulihan, perlindungan sumberdaya perikanan pada umumnya.

Sudah selayaknya apabila sektor kelautan serta perikanan dapat kita jadikan sebagai salah satu potensi unggulan dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Among Tani Dagang Layar” diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat sebagai motor penggerak perekonomian dari hulu sampai hilir, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan daya tarik investor, serta meningkatkan pendapatan nelayan, pengolah, pemasar hasil perikanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Paradigma “Among Tani Dagang Layar” ini merupakan kesatuan kalimat yang memiliki arti kegiatan usaha pertanian dan kelautan secara simultan dan terintegrasi membentuk sinergi dalam pengembangan potensi pantai selatan DIY. Dan bukan terjadinya perubahan fisik dari petani yang biasa mencangkul pindah ke perahu. Namun pergeseran pola pikir, bahwa potensi kelautan di bagian selatan DIY sudah waktunya menjadi potensi utama dalam menyejahterakan rakyat Yogyakarta.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk mendukung pembangunan sektor perikanan tersebut maka Sekolah Lapang Nelayan (SLN) Tahun 2019 ini merupakan kegiatan yang sangat strategis bagi nelayan dan penyuluh perikanan dan kelautan di DIY. Karena adanya perubahan iklim yang tidak pasti telah berakibat pada penurunan potensi dan produksi perikanan (Allison et al, 2009). Perubahan potensi perikanan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suhu air laut yang menyebabkan migrasi ikan serta munculnya penyakit serta organisme pengganggu pertumbuhan ikan dan terjadinya perubahan sirkulasi di laut yang mempengaruhi reproduksi ikan

(Pavidis et al, 2000 dan Sims et al, 2004 dalam Allison et al, 2009). Migrasi ikan ini selanjutnya akan menyebabkan sebagian wilayah tangkap juga berubah.

Selain karena perubahan wilayah tangkap, penurunan hasil tangkap juga berkaitan dengan waktu dan durasi tangkap nelayan. (Siregar dkk 2011) Nelayan semakin sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan karena musim semakin tidak menentu sehingga mereka sulit menentukan waktu melaut yang tepat. Disamping itu terjadinya gelombang tinggi akibat badai tropis juga menghalangi nelayan untuk melaut dalam waktu yang cukup lama (Susandi, 2009)

Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mengurangi resiko atau melakukan adaptasi yang harus dilakukan untuk merespon dampak perubahan iklim yang sudah terjadi dan akan terus terjadi (Leary dkk, 2008). Dimana salah satu faktor penting dalam melakukan adaptasi adalah pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim itu sendiri yang didasari oleh data yang berbasis ilmu pengetahuan global yaitu pengetahuan tentang perubahan iklim. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut, maka tindakan adaptasi yang akan dilakukan akan lebih tepat dan dapat mengurangi resiko yang dihadapi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memanjatkan ridho Allah SWT, Sekolah Lapang Nelayan Tahun 2019 yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Unit Pelaksana Teknis Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
SOSIALISASI
PEMBENTUKAN KOMITE PELATIHAN VOKASI DAERAH
(KPVD) UNTUK AKSELERASI PENINGKATAN
KOMPETENSI SDM NASIONAL
Yogyakarta, 22 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati, Tim Komite Pelatihan Vokasi Nasional;
Yang saya hormati, Ketua Umum KADIN;
Yang saya hormati, Ketua Umum APINDO;
Yang saya hormati, Para Narasumber;
Hadirin Tamu Undangan serta Saudara-saudara yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Sosialisasi Pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) Untuk Akselerasi Peningkatan Kompetensi SDM Nasional. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Untuk mengarahkan pembangunan agar ramah ketenagakerjaan (*employment-growth friendly*), pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perlu disusun rencana tenaga kerja sebagai salah satu acuan

pembangunan, dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi.

Perencanaan tenaga kerja sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan dan pendayagunaan nasional yang berkesinambungan, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi sektoral baik di pusat maupun di daerah.

Hadirin sekalian,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah DIY sangat mendukung Pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) Untuk Akselerasi Peningkatan Kompetensi SDM Nasional, dengan fokus pembangunan sumber daya manusia agar dapat cepat terlaksana. Upaya meningkatkan kompetensi pekerja dengan mengembangkan pelatihan vokasi ini tentunya bekerjasama dengan industri yang ada di daerah. Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja, karena percepatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya dari dunia pendidikan saja tetapi juga pada pelatihan kerja.

Pelatihan vokasi ini juga harus didukung anggaran yang memadai, metode kurikulum yang sesuai kebutuhan industri, fasilitas peralatan canggih, instruktur dan sertifikasi yang diakui secara internasional. Pelaksanaan Pelatihan vokasi ini dapat dilakukan oleh BLK, LPK Swasta, Training Center Industri serta Lembaga pelatihan Kementerian atau Lembaga. Pelatihan ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis karena pengembangan dan penyiapan tenaga kerja kita yang kompeten dan terampil harus dilakukan melalui pelatihan vokasi yang harus dilakukan secara masif dan focus.

Untuk itulah kiranya mohon gambaran umum berkaitan dengan konsep dan implementasi dari Komite Pelatihan Vokasi ini. Dan selanjutnya Pemerintah Daerah DIY akan membentuk tim adhock yang terdiri dari Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi (*triple helix*). Sekaligus kita juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait dalam perencanaan SDM.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
TEMU INVESTOR
“*JOGJA FUND DAY: TOWARDS A SUSTAINABLE
ECOSYSTEM FOR A CREATIVE-BASED DIGITAL ECONOMY*”

Yogyakarta, 23 Maret 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati,

- Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Temu Investor;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Temu Investor dengan tema “*Jogja Fund Day: Towards a Sustainable Ecosystem for a Creative-Based Digital Economy*” dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin dan Peserta Temu Investor sekalian yang Saya hormati,

Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat

memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Revolusi industri generasi empat telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, revolusi industri generasi empat telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan sering muncul pada era revolusi industri generasi empat.

Revolusi industri generasi empat membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah terakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung didalam sebuah jejaring sosial. Banjir informasi menjadi realitas yang ditemukan di era revolusi industri saat ini. Informasi yang sangat melimpah ini menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perekonomian.

Revolusi industri generasi empat tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milineal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi industri juga diikuti dengan implikasi lain seperti pengangguran, kompetisi manusia *versus* mesin, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi.

Hadirin sekalian,

Revolusi industri generasi empat dalam lima tahun mendatang akan menghapus 35 persen jenis pekerjaan. Dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang jenis pekerjaan yang akan hilang bertambah menjadi 75 persen. Hal ini disebabkan pekerjaan yang diperankan oleh manusia setahap demi setahap digantikan dengan teknologi digitalisasi program. Dampaknya, proses produksi menjadi lebih cepat dikerjakan dan lebih mudah

didistribusikan secara masif dengan keterlibatan manusia yang minim.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri generasi empat, Literasi Data dibutuhkan oleh semua orang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan peningkatan layanan publik dan bisnis.

Literasi Teknologi dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi. Sedangkan Literasi Manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen *softskill* atau pengembangan karakter individu untuk bisa berkolaborasi, adaptif dan menjadi arif di era “banjir” informasi.

Melalui acara ini, Saya berharap kita semua untuk mau dan selalu belajar menguasai teknologi serta informasi khususnya dalam bidang bisnis dan ekonomi untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta *survive* di era teknologi informasi revolusi industri generasi empat saat ini. Tanpa penguasaan teknologi dan informasi, kita akan tertinggal jauh dalam komersialisasi inovasi teknologi.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Temu Investor dengan tema “*Jogja Fund Day: Towards a Sustainable Ecosystem for a Creative-Based Digital Economy*”, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
U P A C A R A
PERINGATAN HARI RIMBAWAN 2019

Yogyakarta, 18 Maret 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Peserta Upacara, Para Rimbawan serta Tamu Undangan yang saya hormati,

Salam Rimbawan

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, kepada-Nya kita mengabdikan dan meminta pertolongan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Rimbawan Tahun 2019, Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Hari Rimbawan 2019 tahun ini, telah memasuki tahun peringatan ke-36. Tentunya peringatan tahun ini hendaknya lebih memotivasi, bahkan menyemangati para rimbawan DIY untuk terus berkiprah memberikan sumbangan dan bakti dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Kendati total luas [hutan](#) di DIY hanya 17% dari keseluruhan luas wilayah DIY, terdiri dari 5% [hutan](#) negara dan 12% [hutan](#) rakyat, tetapi seluruh rimbawan di DIY bersama berbagai elemen masyarakat diharapkan tetap berkomitmen menjaga, melindungi, mengkonservasi, mereboisasi, menghijaukan dan mengusahakan hutan secara lestari, dalam memberikan sumbangan nyata bagi masa depan generasi penerus kita yang lebih baik.

Bagaimana seharusnya kita mengelola hutan agar dapat lebih produktif, dapat memberikan sumbangsih bagi kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, maka pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan dengan perencanaan, mutlak diperlukan demi menjaga kelestariannya. Selain itu, pengelolaan hutan yang dilakukan haruslah pula memperhatikan dimensi ekonomi dan lingkungan. Artinya, pemanfaatan nilai ekonomis hutan harus seimbang dengan upaya pelestariannya. Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat.

Saya minta, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tak henti-hentinya untuk belajar, bagaimana mengelola hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan ekonominya. Disinilah sangat dibutuhkan sosok yang memiliki jiwa mulia dan etos kerja yang baik, yang mampu, benar-benar menjalankan amanat untuk melindungi hutan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Hutan kita, masa depan kita. Hutan untuk kesejahteraan rakyat dan lingkungan sehat, kiranya harus kita wujudkan,

mengingat keberadaan [hutan](#) bagi suatu daerah sangat penting, selain sebagai paru-paru kota, juga untuk menyimpan cadangan air yang sangat kita butuhkan. Sumberdaya hutan, tidak saja menjadi aset bangsa, tetapi juga menjadi aset dunia. Karena hutan tidak hanya memiliki fungsi sosial-ekonomi dan sosial-budaya, tetapi juga mempunyai fungsi ekologis, yang peranannya sangat vital bagi kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu dapat dimengerti jika peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian fungsi hutan agar tetap optimal.

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama lebih bekerja keras dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian alam, sehingga bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Selamat memperingati Hari Rimbawan. Selamat bekerja dan bertugas kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Rimbawan DIY. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
WELCOME DINNER DAN
PELANTIKAN PENGURUS
*INTERNATIONAL COUNCIL FOR
SMALL BUSINESS*

Sleman, 29 Maret 2019

*Bismillahirrahmirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Budhaya*

Yang Kami Hormati,

- Jajaran Ketua dan Pengurus *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Perwakilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang kami hormati pula.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara *Welcome Dinner* dan *Pelantikan Pengurus International Council For Small Business* dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan “Selamat Datang” di Yogyakarta kepada seluruh hadirin. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dapat hadir dan berjumpa dengan hadirin sekalian.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Dapat hadir pada acara Pelantikan Pengurus *International Council For Small Business* ini, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Saya. Momen acara kali ini hendaknya dapat menjadi momen yang baik dan bersejarah bagi ICSB.

Tentunya ICSB diharapkan dapat mendukung program pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu Saya juga mengharapkan organisasi ini dapat melakukan pendekatan dan bekerja sama dengan semua kalangan karena sebuah organisasi akan lebih baik ketika bisa menjalin komunikasi dengan semua kalangan yang ada.

ICSB sebagai organisasi diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pembangunan terutama dalam mengerahkan potensi kecendekiawanannya untuk bergerak bersama dengan pemerintah membangun ekonomi masyarakat yang kuat.

Keberadaan pengurus ICSB dari banyak latar belakang tentunya akan memberikan daya kemajemukan pikiran, ide, maupun inovasi di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila kami sangat mengharapkan kontribusi ICSB dalam menyukseskan pembangunan Indonesia serta membantu pemerintah daerah dalam membangun ekonomi masyarakat.

Melalui agenda pelantikan pengurus kali ini, pada dasarnya merupakan kewajiban organisasi sekaligus sebagai evaluasi program kerja dalam penggantian kepengurusan. Dari

pelaksanaan acara ini diharapkan dapat mengetahui visi misi pengurus baru dalam merumuskan program-program kerja yang sifatnya konstruktif dan visioner, sehingga akan meningkatkan eksistensi dan jati diri organisasi di masa-masa mendatang.

Kepada ketua dan jajaran pengurus *International Council For Small Business* yang dilantik, harapannya dapat melaksanakan program-program kerjanya dengan penuh profesionalisme dan dedikasi tinggi, dalam rangka memajukan organisasi. Selamat bekerja dan mengabdikan.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI